



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 62 SERI F NOMOR 536**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 60 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDG'S)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dalam rangka pencapaian Target/Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Samosir perlu disusun Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang *Matriks* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang /

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 22 Seri E Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH MATRIKS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Samosir.
7. TPB/SDG's adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang merupakan dokumen dalam memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
8. Matriks TPB/SDG's adalah Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang berisikan Target TPB/SDG's, Indikator TPB/SDG's, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan di capai Kabupaten Samosir.

BAB II Matriks TPB/SDG's Pasal 2

Matriks TPB/SDG's merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan...../

pembangunan daerah pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dalam bentuk Indikator TPB/SDG's, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan.

Pasal 3

Target Indikator TPB/SDG's Kabupaten Samosir 2016-2021 pada Matriks TPB/SDG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Target Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan TPB/SDG's Kabupaten Samosir 2016-2021 pada Matriks TPB/SDG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Matriks TPB/SDG's menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya pencapaian Target *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals*.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Matriks TPB/SDG's.
- (2) Tata cara pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Matriks TPB/SDG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 3 Desember 2018

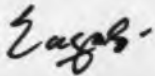
BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 62 SERI F NOMOR 536

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 60 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 DESEMBER 2018

TENTANG : Matriks Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /

Sustainable Development Goals

Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021

TARGET INDIKATOR TPB/SDG'S KABUPATEN SAMOSIR 2016-2021

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki/laki, perempuan dan anak/anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan defenisi nasional.	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	14,40 %	14,72 %	13,23 %	11,82 %	10,30 %	8,50 %	Pemerintah Kabupaten Samosir
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(a) Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).	60%	63%	68%	85%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	3674 KK	4681 KK	4594 KK	-	-	-	Dinas Sosial
1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	72%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	60%	65%	70%	75%	80%	85%	Dinas Kesehatan
	1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	47,86 %	50,06 %	n/a	-	-	-	Dinas Pera KPP
	1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	38,70%	44%	50%	55%	58%	62%	Dinas Pera KPP
	1.4.1(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	98,79 %	98,84 %	98,89 %	98,94 %	98,99 %	98,99 %	Dinas Pendidikan
	1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	89,43 %	89,58 %	89,73 %	89,88 %	90,03 %	90,03 %	Dinas Pendidikan
	1.4.1(j) Persentase penduduk dengan kepemilikan akta kelahiran.	65%	68%	85%	90%	95%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.5 Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	n/a	n/a	n/a	-	1 (desa)	1 (desa)	BPBD

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1.5.1(e) Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	n/a	n/a	0,5	0,5	0,5	0,5	BPBD
1.a Menjamin Mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	330,338,112,496	332,060,215,251	311,832,361,195	318,069,008,419	324,430,388,587	330,918,996,359	BPKAD
2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang Tahun.	2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1.90%	2.20%	2.20%	2.20%	2.19%	2.19%	Dinas Kesehatan
2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2025 mencapai yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 Tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima Tahun/balita.	0%	0%	15%	15%	15%	15%	Dinas Kesehatan
	2.2.1(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua Tahun/baduta.	0%	9.70%	9.70%	9.70%	9.68%	9.68%	Dinas Kesehatan
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 Tahun, berdasarkan tipe.	0.10%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	Dinas Kesehatan

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0%	15%	15%	15%	14%	14%	Dinas Kesehatan
	2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	62.80%	62%	62.50%	63%	63.50%	64%	Dinas Kesehatan
2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	2.5.1*Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang lepas	n/a	n/a	n/a	-	1 (tanaman)	1 (tanaman)	Dinas Pertanian
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	170 per 100.000 kelahiran hidup.	168 per 100.000 kelahiran hidup.	166per 100.000 kelahiran hidup.	164 per 100.000 kelahiran hidup.	162 per 100.000 kelahiran hidup.	160per 100.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan
	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong "oleh tenaga kesehatan terlatih.	80%	71.40%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	17 per 1.000 kelahiran hidup	19 per 1.000 kelahiran hidup	19 per 1.000 kelahiran hidup	19 per 1.000 kelahiran hidup	18 per 1.000 kelahiran hidup	18 per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	11 per 1.000 kelahiran hidup.	14 per 1.000 kelahiran hidup.	14 per 1.000 kelahiran hidup.	14 per 1.000 kelahiran hidup.	13 per 1.000 kelahiran hidup.	13 per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan
	3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	23 per 1.000 kelahiran hidup.	22 per 1.000 kelahiran hidup.	21 per 1.000 kelahiran hidup.	20 per 1.000 kelahiran hidup.	19 per 1.000 kelahiran hidup.	18 per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	1.40%	1.30%	1.20%	1.10%	1%	0.90%	Dinas Kesehatan
	3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	25,2 per 100.000 penduduk.	25,16 per 100.000 penduduk.	25 per 100.000 penduduk.	24,9 per 100.000 penduduk.	24,81 per 100.000 penduduk.	24,71 per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang.	50 per 1.000 orang	49,9 per 1.000 orang	49,8 per 1.000 orang	49,7 per 1.000 orang	49,6 per 1.000 orang	49,5 per 1.000 orang	Dinas Kesehatan
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan "(Filariasis dan Kusta).	0.16%	0.15%	0.14%	0.13%	0.12%	0.11%	Dinas Kesehatan
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 Tahun.	2.80%	2.70%	2.60%	2.50%	2.40%	2.30%	Dinas Kesehatan
	3.4.1(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.87%	1.87%	1.77%	1.66%	1.55%	1.44%	Dinas Kesehatan

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	3.4.1(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 Tahun.	4.32%	4.22%	4.11%	4.01%	3.91%	3.81%	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	n/a	2 orang	2 orang	-	-	-	Dinas Sosial
	3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	n/a	17 orang	18 orang	19 orang	19 orang	20 orang	Dinas Sosial
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	75%	66%	70%	72%	73%	75%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	75%	65%	70%	72%	73%	75%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	91%	94%	90%	90%	90%	90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	na	na	na	38/1000	37/1000	36/1000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)	na	na	3.3/1000	3.2/1000	3.1/1000	3/1000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	60%	63%	68%	85%	100%	100%	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek Perdagangan dari Hak kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	75%	80%	85%	90%	95%	100%	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	614 orang	679 orang	726 orang	803 orang	830 orang	870 orang	Dinas Kesehatan

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada pencapaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	106,27 %	106,27 %	106,32 %	106,37 %	106,42	106,47 %	Dinas Pendidikan
	4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	107,99 %	107,99 %	108,03 %	108,07 %	108,11 %	108,15 %	Dinas Pendidikan
4.2. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.2.2(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	39,93 %	39,93 %	41,43 %	42,93 %	44,43 %	45,93 %	Dinas Pendidikan
4.4. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki ketrampilan yang relevan, termasuk ketrampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	82,14 %	46,22 %	n/a	-	-	-	Sumber data: BPS
4.6. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki/perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi	4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥10 Tahun.	97,74	97,74	97,84	97,94	98,04	98,14	Dinas Pendidikan
	4.6.1 (b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 Tahun							
	4.6.1 (c) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 25-59 Tahun.							

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.a Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	n/a	50	70	80	90	90	Dinas Sosial
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1 (a) Proporsi perempuan umur 10 Tahun ke atas yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 16 Tahun	1,90 %	1,40 %	n/a	-	-	-	BPS
	5.3.1 (b) Proporsi perempuan umur 10 Tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 Tahun.	7,55 %	6,74 %	n/a	-	-	-	BPS
5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	3,20 %	7%	12%	17%	22%	25%	BKD
	5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	49,60 %	48,34 %	n/a	-	-	-	BPS
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	12.68%	16.22%	≤15%	≤9.91%	≤9.79%	≤9.57%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	5.6.1(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	na	na	na	65%	70%	75%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	38,7 %	24,45 %	24,2 %	23,7 %	23,2 %	22%	Dinas Pera KPP
	6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	62.80%	62.80%	n/a	-	-	-	BPS
6.3. Pada Tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	51.67%	51.67%	50-55 %	50 %-60 %	50 %-60 %	50 %-60 %	Dinas Lingkungan hidup

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	10%	15%	20%	25%	30%	35%	Dinas Kesehatan
	6.2.1(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	76 desa	89 desa	95 desa	111 desa	123 desa	134 desa	Dinas Kesehatan
	6.2.1(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	2 desa	6 desa	14 desa	24 desa	34 desa	44 desa	Dinas Kesehatan
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.	5%	32%	44%	55%	65%	75%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	8.3.1(a) Persentase Nakerkoperindang formal.	40%	45%	50%	55%	60%	65%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	14%	15%	16%	17%	18%	20%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
8.5 Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* Persentase peningkatan Upah rata-rata per jam pekerja.	11,70%	8,8%	8,71%	8,9%	9%	9,1%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	1,28%	1,22%	1,14%	1,07%	1,01%	0,87%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	8.5.2(a) Tingkat setengah pengangguran.	25%	30%	35%	40%	45%	50%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
8.6 Pada Tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	30%	40%	50%	55%	60%	65%	UPT. BLK KAB. SAMOSIR
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	14%	15%	16%	17%	18%	20%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	0	0	50%	100%	150%	200%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	14%	15%	16%	17%	18%	20%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(c) Jumlah Desa Tertinggal.	90	83	70	60	50	45	Dinas PPAMD
	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.	0	0	0	1	3	4	Dinas PPAMD
	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	6.50%	6%	5%	4%	3%	2%	Dinas PPAMD
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	749 orang	749 orang	760 orang	780 orang	800 orang	850 orang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
11.1 Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	11.b.2.* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	n/a	1	n/a	-	-	-	BPBD
11.6. Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	53%	54.70%	55.40%	56.80%	58.80%	63.70%	Dinas Lingkungan hidup

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
11.7. Pada Tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.11.7. Pada Tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a). Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan hidup
12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	2400 kg	2400 kg	3000 kg	3000 kg	10800 kg	-	RSUD. Dinas Kesehatan. Dinas Lingkungan hidup
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1.* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	n/a	1	n/a	-	-	-	BPBD

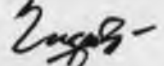
TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan	15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	193.902Ha	193.770 Ha	193.638 Ha	192.760 Ha	191.884 Ha	191.739 Ha	Dinas Lingkungan hidup
15.9. Pada Tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a). Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	n/a	n/a	n/a	1	-	-	Dinas Lingkungan hidup
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	52 kasus	41 kasus	17 kasus	-	-	-	Dinas Polres
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	80%	81%	83%	85%	90%	90%	PPAMD
16.3 Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan .. dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	7 kasus	5 kasus	2 kasus	-	-	-	Polres

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Indikator 16.5.1(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	%	NA	3,66	3,76	3,86	3,96	Inspektorat
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	90.88%	91.87%	93%	94%	95%	96%	BPKAD
	16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	44,2 (C)	50,59 (CC)	66,25 (B)	74,34 (BB)	85,29 (A)	87,22 (A)	Sekretariat Daerah
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	20,00	20,00	n/a	-	-	-	Sekretariat DPRD

TARGET SDG's/ TPB	INDIKATOR TARGET SDG's/ TPB	Tahun DASAR	TARGET PENCAPAIAN					INSTANSI PELAKSANA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b) Persentase anak usia 0-17 Tahun yang memiliki akta kelahiran.	65%	85%	90%	95%	99%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M. Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR@SERI F NOMOR 536

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 60 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 DESEMBER 2018

TENTANG : Matriks Sustainable Development Goals /
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2016-2021

TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN SDG'S/TPB KABUPATEN SAMOSIR 2016-2021

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN					INDIKASI ALOKASI ANGGARAN (juta)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2010	2021			
Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program 1: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan									
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten	KPM	3,674	4,681	4,681	4,900	5,100	5,300	10,000	APBN	Dinas Sosial
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan									
Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten	KUBE	40	25	10	10	10	10	1,300	APBN	Dinas Sosial
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan									
Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu	Paket	-	1	1	1	1	1	2,500	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 4:	4. indikator Kegiatan									
Fasilitasi bantuan beras sejahtera bagi keluarga miskin	Paket	-	1	1	1	1	1	1,250	APBD	Dinas Sosial
Indikator 1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
Program : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja										
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan									
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA)	%	11,70%	8,8%	8,71%	8,9%	9%	9,1%	720	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir

Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit (Biaya Operasional)	Persentase Perusahaan yang melaksanakan UU Ketenagakerjaan	%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	560	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	
	Persentase kasus PHK yang diselesaikan	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%				

Indikator 1.3.1(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Program 1: Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan 1: Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi penyandang cacat produktif	1.1. Output Kegiatan: Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi penyandang cacat produktif	Orang	84	84	84	84	84	84	18	APBD, APBN	Dinas Sosial
---	---	-------	----	----	----	----	----	----	----	------------	--------------

Indikator 1.3.1(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.

Program 1: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan 1: Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Samosir	1.1. Output Kegiatan: Terlaksananya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Samosir	KPM	3,674	4,681	4,681	4,900	5,100	5,300	10,000	APBN	Dinas Sosial
---	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------	--------------

Indikator 1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Program 1: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100	2,859	APBD	Dinas Kesehatan

Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Jaminan Persalinan (Jampersal)	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Pesalinan	%	72	100	100	100	100	100	100	15,758	DAK	Dinas Kesehatan
Indikator 1.4.1(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.												
Program 1: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Peningkatan Imunisasi	Persentase Desa/Kelurahan (Universal Child Immunization)	%	92	93	94	95	97	100		895	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator 1.4.1(g)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.												
Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pembangunan Kantor Guru	Terbangunnya Sarana Kantor Guru	Ruang	2	2	2	2	2	2	2	1,381	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Peningkatan Mutu Prasana SD	Meningkatnya Mutu Prasana SD	Paket	3	3	3	3	3	3	3	22,102	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan											
Pengadaan Mebeleur Sekolah	Tersedianya Mebeleur Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	1	27,628	APBD	Dinas Pendidikan
Indikator 1.4.1(h)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.												
Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Peningkatan Mutu Sarana SMP	Meningkatnya Mutu Sarana SMP	Ruang	1	1	1	1	1	1	1	8,288	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (DAK)	Jumlah Sekolah SMP yang Menerima Bantuan peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	40,000	APBD	Dinas Pendidikan

Indikator 1.5.1(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.												
Program 1: Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Fasilitasi Koordinasi Peningkatan penanganan Bencana	Kegiatan: Forum Koordinasi Penanggulangan Bencana	%	0	0	0	100	100	100	320	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Indikator 1.5.1(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.												
Program 1: Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Fasilitasi Penanganan Akibat Bencana Alam/Sosial	Penyediaan logistik untuk korban bencana	paket	0	1	1	1	1	1	400	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Penyediaan papan informasi di lokasi/daerah potensi rawan bencana	paket	0	0	1	0	0	1	200	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Indikator 1.5.1(e) Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.												
Program 1: Program Pengembangan data/informasi												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Peringatan Dini	Tersedianya <i>Early Warning System</i>	paket	1	0	0	0	0	1	400	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Indikator 1.5.2(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.												
Program 1: Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	Jumlah daerah pasca bencana yang telah tertangani	lokasi (desa)	2	0	0	11	5	7	50,000	APBN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).												
Program 2: Program Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia (0-59 bulan) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	910	APBD dan DAK	Dinas Kesehatan	
Indikator 2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.												
Program 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia (0-59 bulan) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	910	APBD dan DAK	Dinas Kesehatan	

Indikator 2.2.1(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.												
Program 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia (0-59 bulan) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	910	APBD dan DAK	Dinas Kesehatan
Indikator 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.												
Program 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia (0-59 bulan) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	910	APBD dan DAK	Dinas Kesehatan
Indikator 2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.												
Program 1: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	2,859	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Jaminan Persalinan (Jampersal)	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Pesalinan	%	72	100	100	100	100	100	100	15,758	DAK	Dinas Kesehatan
Indikator 2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.												
Program 1: Program Peningkatan Kesehatan Bayi												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Neonatal	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bavi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	1,577	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Bayi	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100	100	100	1,577	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.												
Program 1: Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pengembangan Tanaman Hortikultura	Bibit Tanaman Kentang	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	250	APBD	Dinas Pertanian
Program 2: Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan												

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Fasilitasi Ternak Kambing Panorusan	Bibit Ternak Kambing Panorusan	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	250	APBD	Dinas Pertanian	
Indikator 3.1.1*Angka Kematian Ibu (AKI).												
Program 1: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100	2,859	APBD	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Jaminan Persalinan (Jampersal)	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Pesalinan	%	72	100	100	100	100	100	15,758	DAK	Dinas Kesehatan	
Indikator 3.2.1*Angka Kematian Balita (AKBa)per 1.000 kelahiran hidup.												
Program 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Anak Usia (0-59 bulan) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	910	APBD dan DAK	Dinas Kesehatan	
Indikator 3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.												
Program 1: Program Peningkatan Kesehatan Bayi												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Neonatal	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bavi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	1,577	APBD	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Bayi	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100	100	1,577	APBD	Dinas Kesehatan	
Indikator 3.2.2(a)Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.												
Program 1: Program Peningkatan Kesehatan Bayi												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Neonatal	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bavi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	1,577	APBD	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pelayanan Kesehatan Bayi	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100	100	1,577	APBD	Dinas Kesehatan	

Indikator 3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.											
Program 1: Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	673	APBD Dinas Kesehatan
Indikator 3.3.2 Kejadian TB per 1.000 orang.											
Program 1: Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	1,105	APBD Dinas Kesehatan
Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang.											
Program 1: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	Persentase Penderita Malaria yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	1,000	APBD Dinas Kesehatan
Indikator 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).											
Program 1: Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	Persentase Penderita Kusta yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	66	APBD Dinas Kesehatan
Indikator 3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.											
Program 1: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Degeneratif											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru, Obstruktif kronis (PPOK)	Persentase Penderita PPOK yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	410	APBD Dinas Kesehatan
Indikator 3.4.1(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.											
Program 1: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Degeneratif											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	410	APBD Dinas Kesehatan

Indikator 3.4.1(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.**Program 1: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Degeneratif**

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru, Obstruktif kronis (PPOK)	Persentase Penderita PPOK yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	410	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	410	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan											
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Obesitas	Persentase Penderita Obesitas yang ditangani sesuai Standar Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	410	APBD	Dinas Kesehatan

Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode**Program 1: Program Keluarga Berencana**

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pengadaan alat dan obat kontrasepsi	alat dan obat kontrasepsi	paket	4	4	4	4	4	4	4	3,800	APBN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pemasangan Pelayanan Kontrasepsi KB	Pelayanan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Bhakti Sosial IBI-KB-Kes	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	169	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan											
Pelayanan KB Medis Operasi	Pencapaian Peserta KB Medis Operasi Pria	akseptor	10	10	10	10	30	30	30	359	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator 3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Program 1: Keluarga Berencana												
Kegiatan 1		1. indikator Kegiatan										
Distribusi alat dan obat kontrasepsi	Cakupan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	626	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2:		2. indikator Kegiatan										
Penanganan komplikasi alat kontrasepsi	Komplikasi akibat alat dan obat kontrasepsi tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	157	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 3:		3. indikator Kegiatan										
Promosi Pelayanan Khiba	Pelayanan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	116	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 4:		4. indikator Kegiatan										
Pembinaan Keluarga Berencana	Pelayanan Alat dan Obat Kontrasepsi pada TNI-KB-Kes	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	276	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 5:		5. indikator Kegiatan										
Operasional Balai KB	Operasional kegiatan bagi balai penyuluhan KB	unit	9	9	9	9	9	9	9	508	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program 2: pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri												
Kegiatan 1		1. indikator Kegiatan										
Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Keaktifan Kelompok Ketahanan Keluarga	tahun	1	1	1	1	1	1	1	5,100	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2:		2. indikator Kegiatan										

Pembinaan Kelompok UPPKS	Keaktifan Kelompok UPPKS	tahun	na	0	0	0	1	1	400	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program 3: Program Pengendalian Penduduk											
Kegiatan 1	1. indikator Kegiatan										
Pembinaan Kampung KB	Keaktifan Kampung KB	Desa	1	1	8	30	30	30	3,800	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan										
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Updating data keluarga	KK	na	3100	0	0	3200	320	457	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan										
Penyusunan Profil Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	Tersedianya data-data pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana	Dok	na	0	0	0	1	1	200	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 4:	4. indikator Kegiatan										
Sosialisasi dan atau penetapan Kebijakan KKBPK	Kebijakan KKBPK	Kebijakan	1	1	1	0	1	1	600	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator 3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.

Program 1: Program Keluarga Berencana

Kegiatan 1		1. indikator Kegiatan										
Pengadaan alat dan obat kontrasepsi	alat dan obat kontrasepsi	paket	4	4	4	4	4	4	4	3,800	APBN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2		2. indikator Kegiatan										
Pemasangan Pelayanan Kontrasepsi KB	Pelayanan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Bhakti Sosial IBI-KB-Kes	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1,549	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 3:		3. indikator Kegiatan										
Pelayanan KB Medis Operasi	Pencapaian Peserta KB Medis Operasi Pria	akseptor	10	10	10	10	30	30	359	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Indikator 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR).

Program 1: Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan 1:		1. indikator Kegiatan										
Pembinaan Kampung KB	Keaktifan Kampung KB	Desa	1	1	8	30	30	30	3,800	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Indikator 3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program 1: Program pelayanan jaminan kesehatan nasional

Kegiatan 1:		1. indikator Kegiatan										
Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kab. Samosir	Persentase Keluarga yang sudah menjadi anggota JKN	%	50	60	70	80	90	100	21,469	PAD	Dinas Kesehatan	

Indikator 3.b.1(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Program 1: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan 1:		1. indikator Kegiatan										
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin	%	75	80	85	90	95	100	13,824	APBD dan DAK	Dinas Kesehatan	

Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											
Program 1: Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Penyediaan Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memenuhi Standar Ketenagaan Minimal	Pusk	1 Pusk	1 Pusk	1 Pusk	5 Pusk	8 Pusk	13 Pusk	5,058	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan										
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Persentase Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi	%	10%	10%	10%	40%	70%	80%	75	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan										
Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang akan diangkat kedalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing	Orang	0	0	0	14 orang	27 orang	37 orang	41	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 4:	4. indikator Kegiatan										
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan	Jumlah Tenaga yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan	Orang	0	0	0	78 orang	114 orang	150 orang	1,328	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 5:	5. indikator Kegiatan										
Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pendampingan dan survei akreditasi	Pusk	2 Pusk	5 Pusk	9 Pusk	12 Pusk	12 Pusk	12 Pusk	5,705	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum											
Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pengadaan Buku Teks Pelajaran SD dan SMP	Pengadaan Buku Teks Pelajaran SD dan SMP	Paket	n/a	2	2	2	2	2	11,051	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan										
Penyelenggraan paket B setara SMP	Penyelenggaran Ujian Paket B Setara SMP	Kegiatan	n/a	1	1	1	1	1	1,988	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan										
Pelaksanaan Olimpiade dan Lomba-lomba Siswa SD	Olimpiade SD	Lomba	n/a	4	4	4	4	4	3,315	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan 4:	4. indikator Kegiatan										
Pelaksanaan Olimpiade dan Lomba-lomba Siswa SMP	Olimpiade SMP	Lomba	n/a	4	4	4	4	4	3,315	APBD	Dinas Pendidikan

Kegiatan 5:	5. indikator Kegiatan											
Pelaksanaan Ujian Nasional SD dan SMP	Pelaksanaan Ujian Nasional SD dan SMP	Kegiatan	n/a	1	1	1	1	1	3,315	APBD	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.												
Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penyaluran Bantuan operasional sekolah	Pelaksanaan BOK	Sekolah	n/a	160	165	170	175	180	n/a	APBN	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.												
Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penyaluran Bantuan operasional sekolah	Jumlah SMP Berakreditasi Minimal B	Sekolah	n/a	33	33	33	33	34	n/a	APBN	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.												
Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Peningkatan Mutu Prasana SMP	Meningkatnya Mutu Prasana SMP	kegiatan	n/a	1	1	1	1	1	16,576	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Peningkatan Mutu Sarana SMP	Meningkatnya Mutu Sarana SMP	Ruang	n/a	1	1	1	1	1	8,288	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan											
Peningkatan Mutu Sarana Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (DAK)	Jumlah Sekolah SMP yang Menerima Bantuan peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana	Kegiatan	n/a	2	2	2	2	2	40,000	APBD	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.2.2(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).												
Program 1: Program Pendidikan Anak Usia Dini												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini.	Jumlah Materi ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang disusun	Kegiatan	n/a	1	1	1	1	1	165	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pengadaan Alat Peraga dan Permainan PAUD	Alat Peraga dan Permainan PAUD yang tersedia	Kegiatan	n/a	2	2	2	2	2	1,105	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan											
Pengadaan Alat Peraga dan Permainan TK	Jumlah Ketersediaan Alat Peraga dan Permainan TK	Paket	n/a	1	1	1	1	1	165	APBD	Dinas Pendidikan	

Kegiatan 4:	4. indikator Kegiatan											
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang didirikan	Paud	n/a	1	1	1	1	1	165	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 5:	5. indikator Kegiatan											
Penyediaan Bantuan Operasional TK Negeri	Jumlah TK yang mendapatkan bantuan operasional	Kegiatan	n/a	1	1	1	1	1	55	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 6:	6. indikator Kegiatan											
Pelaksanaan Lomba kreativitas anak usia dini	Jenis Lomba yang diikuti	Kegiatan	n/a	1	1	1	1	1	1,105	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 7:	7. indikator Kegiatan											
Pelatihan Tutor PAUD	Pelaksanaan Pelatihan Tutor PAUD	Orng	n/a	100	100	100	50	50	1,657	APBD	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses internet untuk tujuan pengajaran,												
Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penyediaan Akses Internet	Tersedianya Akses Internet Sekolah	Sekolah	n/a	10	10	10	10	10	500	APBD	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke komputer untuk tujuan pengajaran												
Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pengadaan Laboratorium Komputer SMP	Tersedianya Laboratorium SMP	Sekolah	n/a	1	1	1	1	1	1,400	APBD/ APBN	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pengadaan Komputer Sekolah	Tersedianya Komputer Sekolah	Unit	n/a	50	50	50	50	50	2,500	APBD/ APBN	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke air minum layak												
Program 1: Program Wajib Belajar Sembilan Tahun												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penyediaan Sanitasi Sekolah	Tersedianya Sanitasi Sekolah	Unit	n/a	10	10	10	10	10	5,525	APBD/ APBN	Dinas Pendidikan	
Indikator 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik.												
Program 1: Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Bantuan Biaya Tugas/Ijin Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Org	n/a	2	2	2	2	2	375	APBD	Dinas Pendidikan	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Org	n/a	50	50	50	50	50	1,105	APBD/ APBN	Dinas Pendidikan	

Indikator 5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).**Program 1 : Program Keluarga Berencana**

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pembinaan Kelompok UPPKS	Keaktifan Kelompok UPPKS	tahun	n/a	0	0	0	1	1	400	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Program 2: Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Updating data keluarga	KK	n/a	3100	0	0	3200	320	457	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan										
Penyusunan Profil Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	Tersedianya data-data pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana	Dok	n/a	0	0	0	1	1	200	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator 5.6.1(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.**Program 1 : Program Keluarga Berencana**

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Promosi Pelayanan Khiba	Pelayanan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	117	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pembinaan Keluarga Berencana	Pelayanan Alat dan Obat Kontrasepsi pada TNI-KB-Kes	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	276	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program 2: Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Keaktifan Kelompok Ketahanan Keluarga	tahun	1	1	1	1	1	1	5,100	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan										
Pembinaan Kelompok UPPKS	Keaktifan Kelompok UPPKS	tahun	n/a	0	0	0	1	1	400	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program 3: Program Pengendalian Penduduk											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Sosialisasi dan atau penetapan Kebijakan KKBPK	Kebijakan KKBPK	tahun	1	1	1	0	1	1	600	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indikator 6.2.1(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).											
Program 1: Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase Penduduk mempunyai Akses Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	%	50	60	70	80	85	90	1,846	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator 6.2.1(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).											
Program 1: Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase Penduduk mempunyai Akses Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	%	50	60	70	80	85	90	1,846	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator 6.3.2(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.											
Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diawasi	Dokumen	28	43	115	120	128	135	325	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan										
Penyusunan Peta Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan	Peta Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan	Dokumen	0	0	0	1	1	0	500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program 2 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pembangunan TPA	Unit	0	0	0	0	1	0	10,000	DAK	Dinas Lingkungan Hidup	
Indikator 8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.												
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Koperasi yang melaksanakan RAT	%	5%	32%	44%	55%	65%	75%	600	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	
	Persentase koperasi yang lengkap databasenya	%	5%	32%	44%	55%	65%	75%				
	Persentase koperasi yang difasilitasi pengurusan SNIK	%	5%	32%	44%	55%	65%	75%				
Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.												
Program : Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah (DEPEDA)	Persentase Peningkatan Upah Minimum Kabupaten	%	11,70%	8,8%	8,71%	8,9%	9%	9,1%	720	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit (Biaya Operasional)	Persentase Perusahaan yang melaksanakan UU Ketenagakeriaan	%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	560	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	
	Persentase kasus PHK yang diselesaikan	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%				
Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).												
Program 1 : Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pelatihan Berbasis Kompetensi	SDM Berkompeten	orang	96	96	288	352	352	352	541	APBD	UPT. BLK KAB. SAMOSIR	

Indikator 8.10.1(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.												
Program 1: Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi												
Kegiatan 1:												
1. indikator Kegiatan												
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Koperasi yang melaksanakan RAT	%	5%	32%	44%	55%	65%	75%	600	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	
	Persentase koperasi yang lengkap databasenya	%	5%	32%	44%	55%	65%	75%				
	Persentase koperasi yang difasilitasi pengurusan SNIK	%	5%	32%	44%	55%	65%	75%				
Program 2 : Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif												
Kegiatan 1:												
1. indikator Kegiatan												
Pengembangan Usaha Kecil dan menengah	Persentase tenaga kerja di sektor UMKM yang memiliki sertifikat pelatihan	%	0	0	100%	100%	100%	100%	1,310	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	
	Persentase pelaku usaha mikro yang menggunakan jasa perbankan	%	14%	15%	16%	17%	18%	20%				
	Persentase omset UMKM	%	1,8%	3,7%	4,7%	6%	7%	8%				
	Persentase UMKM yang telah mendapat legalitas usaha	%	0%	5%	7%	9%	11%	15%				
Program 3 :Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah												
Kegiatan 1:												
1. indikator Kegiatan												
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kerajinan Tenun ATBM	Jumlah Peningkatan Pengrajin Tenun ATBM	Pengrajin	40	50	50	60	70	80	680	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase Peningkatan Omzet Perajin Tenun ATBM	%	1,8%	3,7%	4,7%	6%	7%	8%				
Kegiatan 2:												
2. indikator Kegiatan												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Dekranasda	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung Dekranasda yang bertambah	%	0	0	25%	35%	45%	55%	900	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	

Indikator 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											
Program 1: Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pengembangan Usaha Kecil dan menengah	Persentase tenaga kerja di sektor UMKM yang memiliki sertifikat pelatihan	%	0	0	100%	100%	100%	100%	1,310	APBD	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir
	Persentase pelaku usaha mikro yang menggunakan jasa perbankan	%	14%	15%	16%	17%	18%	20%			
	Persentase omset UMKM	%	1,8%	3,7%	4,7%	6%	7%	8%			
	Persentase UMKM yang telah mendapat legalitas usaha	%	0%	5%	7%	9%	11%	15%			
Indikator 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.											
Program 1: Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam											
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Penanaman Pohon	Bibit	9000	9000	0	5000	5000	5000	1,500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan									
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan (lahan kritis)	Penanaman Pohon	Bibit	0	0	5000	5000	5000	5000	1,200	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Indikator 10.1.1 (c) Jumlah desa tertinggal											
Program 1: Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan											
Kegiatan 1: Fasilitasi penyusunan APBDes	1.1 Output kegiatan: Tersusunnya APBDes 128 Desa	Desa	128	128	128	128	128	128	2,453	DAU	Dinas PPAMD
Kegiatan 2: Pembinaan dan monitoring pelaksanaan APBDes	1.1 Output kegiatan: Termonitoringnya APBDes 128 Desa	Desa	128	128	128	128	128	128	1,354	DAU	Dinas PPAMD
Kegiatan 3: Fasilitasi up-dating profil desa	1.1 Output kegiatan: Terlaksananya fasilitasi up-dating profil desa 128 desa	Desa	128	128	128	128	128	128	1,886	DAU	Dinas PPAMD
Kegiatan 4: Penyelenggaraan dan pembinaan perlombaan desa	1.1 Output kegiatan: Terlaksananya perlombaan 128 desa	Desa	128	128	128	128	128	128	1,890	DAU	Dinas PPAMD

Kegiatan 5: Pencanaan dan pembekalan bulan bakti gotong royong	1.1 Output kegiatan: Terlaksananya gotong royong di 128 desa secara berkelanjutan	Desa	128	128	128	128	128	128	1,812	DAU	Dinas PPAMD
--	---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------------

Indikator 10.1.1 (d) Jumlah desa mandiri

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Kegiatan 1: Workshop pembentukan, pembinaan dan penguatan BUMDes	1.1 Output kegiatan: Terbentuknya Bumdes 128 dan Bumdes Bersama	Desa	128	128	128	128	128	128	1,312	DAU	Dinas PPAMD
Kegiatan 2: Pembentukan prudes (produk unggulan desa)/Prukades (produk kawasan perdesaan)	1.1 Output kegiatan: Teciptanya inovasi 128 desa untuk meningkatkan ekonomi lokal desa	Desa	128	128	128	128	128	128	1,840	DAU	Dinas PPAMD
Kegiatan 3: Fasilitasi SPP Eks PNPB-Mandiri	1.1 Output kegiatan: Termonitornya dana SPP Eks PNPB-Mandiri	UPK	9	9	9	9	9	9	1,840	DAU	Dinas PPAMD

Indikator 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan

Program 1: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan 1:		1. indikator Kegiatan									
	Sarana persampahan	Unit	1017	616	419	1004	1002	1000	5,388	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Truk Sampah	Unit	11	0	0	4	2	0	3,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Kendaraan Roda Tiga (Betor)	Unit	6	6	14	0	0	0	938	APBD/DAK/CSR	Dinas Lingkungan Hidup
	Tong Sampah	Unit	1000	610	405	1000	1000	1000	750	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Container	Unit	n/a	n/a	2	4	4	4	700	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembangunan TPA	Unit	0	0	0	0	1	0	10,000	DAK	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2:		2. indikator Kegiatan									
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	%	53	54.7	55.4	56.8	58.8	63.7	5,716	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Personil Truk Sampah	Orang	36	36	36	52	60	60	4,978	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Personil Penyapu Jalan (Betor)	Orang	15	27	39	39	39	39	3,733	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Personil Draenasi	Orang	0	0	4	4	4	4	286	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Personil Kapal Motor (Danau)	Orang	10	8	5	5	5	5	571	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Personil Taman	Orang	0	2	3	5	5	5	408	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Personil Road sweeper	Orang	3	3	3	3	3	3	306	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Pakaian Kerja Lapangan Personil Kebersihan	Pasang	0	76	91	91	91	91	241	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Biaya BBM Kendaraan Operasional Persampahan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1,620	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Biaya Service Kendaraan Operasional Persampahan	Tahun	1	1	1	1	1	1	1,470	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Alat dan Bahan Pembersih (Bahan Kimia)	Tahun	1	1	1	1	1	1	80	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator 11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.

Program 1: Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Penataan RTH	Luasan RTH	m ²	3,310	8,130	8,130	9,349	10,284	11,312	15,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator 12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

Program 1: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan										
Pembangunan Bank Sampah	Bank Sampah	Unit	0	0	0	0	1	0	500	APBD/DAK	Dinas Lingkungan Hidup

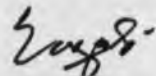
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS3R)	Tempat Pengelolaan Sampah (TPS3R)	Unit	0	0	0	0	2	0	300	APBD/DAK	Dinas Lingkungan Hidup	
Indikator 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.												
Program 1: Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penyusunan rencana kontijensi pengurangan resiko dan mitigasi bencana	Dokumen Rencana Kontijensi dan Mitigasi Bencana	dokumen	0	0	0	0	5	0	1,000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Indikator 15.3.1(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.												
Program 1: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Penanaman Pohon	Bibit	9000	9000	0	5000	5000	5000	1,500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
Program 2 :Program Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan (lahan kritis)	Penanaman Pohon	Bibit	0	0	5000	5000	5000	5000	1,200	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembangunan Naungan Pembibitan Pohon	Unit	0	0	1	0	0	0	100	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
Indikator 15.9.1(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.												
Program 1: Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Profil Kehayati dan ekosistem	Dokumen	0	0	0	0	1	0	300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
Indikator 16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 tahun terakhir												
Program 1: Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penguatan forum anak kabupaten samosir	Tertampungnya aspirasi anak melalui forum anak	%	0	0	50%	70%	85%	100%	600	APBD	Dinas PPAMD	

Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Fasilitasi Penguatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Jumlah Persentase kasus terhadap perempuan dan anak yang ditangani	%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	5,332	APBD	Dinas PPAMD	
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan											
Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	0	0	20%	30%	40%	50%	1,941	APBD	Dinas PPAMD	
Kegiatan 4:	4. indikator Kegiatan											
Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	0	0	20	30	40	50	1,941	APBD	Dinas PPAMD	
Indikator 16.5.1(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).												
Program 1: Program Pengendalian Sistem Pengawasan Internal serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (KORSUPGAH) KPK RI	Persentase realisasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	NA	34,45	45	50	55	60	600	APBD	Inspektorat	
Kegiatan 2:	2. indikator Kegiatan											
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Jumlah laporan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Laporan	NA	NA	NA	1 Lap	1 Lap	1 Lap	210	APBD	Inspektorat	
Kegiatan 3:	3. indikator Kegiatan											
Operasional dan penguatan satgas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)	Laporan Pelaksanaan Saberpungli	Laporan	NA	NA	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	570	APBD	Inspektorat	

Indikator 16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/												
Program 1: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
Kegiatan 1:	1. indikator Kegiatan											
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Samosir	Penyampaian Laporan Keuangan yang tepat sesuai dengan regulasi	Opini	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	5,528	APBD	BPKAD

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 62 SERI F NOMOR 536

BUPATI SAMOSIR
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON